

**PENGARUH EFEKTIFITAS FUNGSI AUDIT  
INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN  
BUMN DIMODERASI OLEH PENGARUH POLITIK  
( STUDI EMPIRIS DI INDONESIA )**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**THEOBALDUS MARADONA BIMANTARA**

**NIM : C2C008138**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Theobaldus Maradona Bimantara

Nomor Induk Mahasiswa : C2C 008 138

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH EFEKTIFITAS FUNGSI AUDIT  
INTERNAL TERHADAP KINERJA  
PERUSAHAAN BUMN DIMODERASI OLEH  
PENGARUH POLITIK ( STUDI EMPIRIS DI  
INDONESIA)**

Dosen Pembimbing : Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt.

Semarang, 17 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

(Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt.)

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Theobaldus Maradona Bimantara

Nomor Induk Mahasiswa : C2C 008 138

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH EFEKTIFITAS FUNGSI AUDIT  
INTERNAL TERHADAP KINERJA  
PERUSAHAAN BUMN DIMODERASI OLEH  
PENGARUH POLITIK ( STUDI EMPIRIS DI  
INDONESIA )**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Agustus 2015**

Tim Penguji :

1. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt. ( ..... )
2. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. ( ..... )
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. ( ..... )

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Theobaldus Maradona Bimantara, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH EFEKTIFITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN BUMN DIMODERASI OLEH PENGARUH POLITIK (STUDI EMPIRIS DI INDONESIA)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

( Theo M. Bimantara )

C2C 008 138

## **ABSTRACT**

*This research aims to examine the relationship between internal audit practice and financial performance of BUMN with consideration to contextual effect of political condition as mediating variable between internal audit practice and financial performance of BUMN In Indonesia. Many empirical findings have provided a number of explanations regarding the difference in BUMN performance, however empirical evidences on the effect of relationship between internal audit practice and BUMN financial performance in Indonesia is still scarce.*

*This research was conducted by analyzing data Annual Report BUMN. that is downloaded in IDX website. In the analysis used in this study, in addition to using descriptive and inferential statistical analysis using SPSS 16.0. The research model analyzed by using Moderated Regression Analysis (MRA).*

*The results showed that no significant correlation in the effectiveness of the internal audit function on the financial performance BUMN in Indonesia. And then, there is no moderating effect of political context on the effectiveness of the internal audit function influence on the financial performance BUMN in Indonesia. However, the findings of this study used data that might be too little consequence the number of BUMN that is not enough. No evidence of the moderating effects in this study define that political context is not a moderating variable.*

*Keywords: Effectiveness of Internal Audit Function, Political Influence, Financial Performance, BUMN (State Owned Enterprises).*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas fungsi audit internal terhadap kinerja keuangan BUMN dan dengan mempertimbangkan efek kontekstual pengaruh politik sebagai variabel yang memoderasi kedua variabel tersebut. Banyaknya karya empiris telah memberikan beragam alasan yang menjelaskan baik buruknya performa kinerja BUMN di Indonesia, akan tetapi bukti penelitian tentang dampak dari pengaruh efektifitas fungsi audit internal terhadap kinerja keuangan BUMN di Indonesia masih jarang di temukan.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data *Annual Report* BUMN yang di unduh di website IDX. Dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini, selain menggunakan statistik deskriptif dan inferensial analisis dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0. Model penelitian di analisis dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam efektifitas fungsi audit internal terhadap kinerja keuangan BUMN di Indonesia. Dan kemudian, tidak ada efek moderasi dari pengaruh politik dalam pengaruh efektifitas fungsi audit internal terhadap kinerja keuangan BUMN di Indonesia. Namun demikian, dalam temuan penelitian ini data yang digunakan mungkin terlalu sedikit akibat jumlah BUMN yang tidak cukup banyak. Tidak terbuktinya efek moderasi dalam penelitian ini mengartikan bahwa pengaruh politik bukan merupakan variabel moderasi.

Kata kunci : Efektifitas Fungsi Audit Internal, Pengaruh Politik, Kinerja Keuangan Perusahaan, BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ).

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“ I DON’T AGREE WITH WHAT YOU HAVE TO SAY, BUT I’LL DEFEND  
TO THE DEATH YOUR RIGH TO SAY IT “

VOLTAIRE

“ DEPOSIT POTENTES DE SEDE EXTAVALTAT HUMILES “

KALIMAT PENUTUP RUMAH KACA

THE HOTTEST LOVE HAS THE COLDEST END.

SOCRATES

*Persembahan*

*Skrripsi ini saya persembahkan untuk seluruh kerabat tercinta dan semua  
yang seperti kerabat, saya persembahkan dengan segala kerendahan hati.*

*Terimakasih.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Semesta Alam karena dengan segala kuasa dan kemungkinan-kemungkinannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Diponegoro. Karena dengan sedikit keajaiban dan sentuhan tangan – Nya penulis merasa termotivasi dalam proses pembuatan skripsi ini. Sehingga dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Skripsi ini merupakan laporan tertulis mengenai pengaruh politik sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara audit internal dan kinerja keuangan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teoritis dan implikasi praktik audit internal dalam BUMN di Indonesia.

Begitu banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terlebih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Puji Harto, SE., M.Si.,Akt., Ph.D. selaku dosen wali penulis yang memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama penulis menempuh kuliah.



4. Bapak Herry Laksito, SE., M.adv., Acc., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan ilmu, ide-ide, dan solusi-solusi praktis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro untuk semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah.
6. Keluarga MADYANI dan Pakde Hubertus Didik Emanuel yang tak henti-hentinya memberikan support yang luar biasa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Bapak dan Ibu, Yoseph dan Maria dan adik tersayang Bella yang senantiasa memberi perhatian dan kasih sayang kepada penulis.
8. Ema Maharani, terimakasih buat waktu, senyumnya, tawanya, jahilnya, dan yang terpenting buat selalu percaya kepada penulis sehingga penulis dengan keterbatasannya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta, brian, bayu, rino, uci, iin, caca, yaya dan acun karena persahabatan yang tidak pernah lekang oleh jaman.
10. Kepada sahabat yang menjadi pelabuhan dalam bertukar pikiran Kondek, Niken, Wulan, Bawang, Finta, Ateng, Ucil, Ayip, Putra, Rino dan Radit terima kasih telah membagi waktu untuk sekedar ngopi.
11. Kawan – kawan GMNI di Komisariat FE UNDIP yang telah menjadi kawan dalam pembentukan pola pikir dan memberi kacamata dalam memandang dunia. Kepada kalian hati akan selalu terbuka.

12. Teman – teman di UPK FEPALA dan BUIH aan, soni, niki, mas elang, mbah melur dan saudara-saudara seangkatan fepala XVIII... Mas, dek persaudaraan kita bakal terus-terusan dan nambah terus setiap tahun. Ayo kita naik gunung, sampe kakek nenek FEPALA JAYA!!
13. Kepada teman KKN Di Desa Tanjungsari dengan kekonyolan dan kehangatan canda tawanya, anak kos apartemen sunset dan kepada “Bro, sis, cuk, dab, bos, kas, gais, mas, dek” dan kalian semua makasi yaaaa.
14. Kepada perusahaan BUMN yang bersedia untuk memberikan kesempatan, dengan hormat saya sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.
15. Kepada @gojekindonesia hehee .. terimakasih atas promo Rp. 10.000 – nya ..perjalanan muter-muter nyari alamat responden di jakarta jadi ndak nyekek leher saya. Semoga sukses meyakinkan banyak tukang ojek lainnya, biar aplikasinya ndak berakhir jadi bahan gojek.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Semarang, 17 Agustus 2015

Theobaldus M. Bimantara  
NIM C2C 008 138

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Keagenan .....	14
2.1.2 Efektifitas Fungsi Audit Internal .....	16

2.1.2.1	Internal Audit Disclosure .....	18
2.1.2.2	Komite Audit .....	26
2.1.2.3	Eksternal Audit .....	31
2.1.3	Kinerja Perusahaan.....	35
2.1.4	Pengaruh Politik.....	37
2.1.5	Audit Internal dan Kinerja Perusahaan.....	39
2.2	Penelitian Terdahulu.....	41
2.3	Kerangka Pemikiran.....	42
2.4	Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....		51
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	51
3.1.1	Variabel Penelitian.....	51
3.1.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	51
3.1.2.1	Efektifitas Fungsi Audit Internal.....	51
3.1.2.2	Kinerja Keuangan.....	57
3.1.2.3	Political Influence.....	58
3.2	Populasi dan Sampel.....	59
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	59
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	60
3.5	Metode Analisis.....	60
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	61
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	61
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	61
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas.....	62
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	63

3.5.3	Uji Hipotesis.....	63
3.5.3.1	Multiple Regression Analysis ( MRA ).....	64
3.5.3.2	Pengujian Hipotesis .....	65
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....		69
4.1	Gambaran Responden.....	69
4.2	Analisa Data .....	74
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	74
4.2.1.1	Uji Normalitas.....	74
4.2.1.2	Uji Multikolinearitas.....	75
4.2.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	76
4.2.2	Pengujian Hipotesis.....	78
4.2.2.1	Uji Model 1.....	78
4.2.2.2	Uji Model 2 .....	82
4.3	Intepretasi Hasil .....	85
4.3.1	Efektifitas Fungsi Audit Internal dan Kinerja Perusahaan.....	85
4.3.2	Efek Moderasi Pengaruh Politik.....	86
BAB V PENUTUP.....		89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	91
5.3	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....		93
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		94

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah BUMN menurut jenisnya tahun 2008-2012.....	2
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan .....	70
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	71
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	75
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	76
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1.....	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Model 1 .....	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Parameter Individual Model 1 .....	81
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2.....	82
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Model 2 .....	83
Tabel 4.11 Hasil Uji Parameter Individual Model 1 .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 4.1 Hasil Uji P-P Plot.....	74
Gambar 4.2 Hasil Uji Scatterplot.....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN A TABULASI DATA

LAMPIRAN B HASIL UJI SPSS



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Partisipasi negara dalam kegiatan ekonomi adalah fenomena yang terjadi diseluruh dunia. Di Indonesia sendiri, aktifitas negara dalam usaha meningkatkan pendapatan negara dijalankan oleh perusahaan milik pemerintah atau yang sering disebut dengan Badan Usaha Milik pemerintah (BUMN). BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pelaku ekonomi nasional terdiri dari tiga bentuk usaha : BUMN/D, Swasta, dan Koperasi. Artinya, konstitusi di Indonesia telah memberikan maklumat bahwa terdapat perusahaan-perusahaan milik negara (baik itu BUMN/BUMD), disamping Swasta dan Koperasi. Sebagian besar BUMN/BUMD adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola utilitas publik, seperti perusahaan minyak bumi, listrik, air, hingga perusahaan transportasi. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 1998 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh kementerian BUMN. Saat ini Badan Usaha Milik Negara memiliki tiga bentuk badan hukum perusahaan, yaitu Perusahaan Umum (Perum) yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak

terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, Perusahaan Terbatas Perseroan ( PT Persero) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan dan Perusahaan Terbatas Perseroan Terbuka (PT Persero Tbk.) yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut jumlah BUMN selama tahun 2008-2012 mengalami perubahan, untuk lebih jelas keterangan terdapat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah BUMN menurut jenisnya tahun 2008-2012

No	Jenis BUMN	2008	2009	2010	2011*)	2012
1	Perum	14	14	14	14	15
2	Persero	113	113	114	109	108
3	Persero Tbk	14	14	14	18	19
	<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>142</b>	<b>141</b>	<b>142</b>

\*) Angka Revisi

Data Badan Pusat Statistik Jateng 2012

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja BUMN menunjukkan peningkatan laba yang cukup signifikan. Dalam tahun 2011-2012 peningkatan laba BUMN sebesar 20,63 Triliun Rupiah meningkat 17,49% dari tahun sebelumnya (*data : BPS Jateng 2012*). Tentunya peningkatan ini baik untuk BUMN karena hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kinerja BUMN juga menjadi baik. Ditengah tuduhan bahwa BUMN saat ini memiliki kinerja yang buruk dan tidak efisien, lekat dengan korupsi dan banyak suara miring terkait dengan independensi BUMN terhadap intervensi dari pemerintah.

BUMN sebagai lembaga usaha milik pemerintah yang dinilai dapat membantu mendongkrak pendapatan negara disinyalir sebagai lahan “bagi-bagi” jatah jabatan untuk rekanan kekuasaan, bahkan lebih buruk lagi, BUMN di sebutkan menjadi lumbung dari pundi-pundi dana persiapan kampanye di periode selanjutnya. Banyaknya anggota parpol dan purnawirawan TNI/Polri malah menempati posisi-posisi puncak dalam struktur organisasi BUMN, porsinya bahkan lebih besar dari kebanyakan profesional yang layak menempati posisi tersebut.

Praktik pengendalian akuntansi dalam sebuah perusahaan (seperti audit internal) diyakini secara luas memiliki efek yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan karena bertindak sebagai rem yang kuat terhadap kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan (Kiable, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang menempatkan sistem audit yang tepat dan memadai cenderung memiliki kinerja finansial yang baik dari pada perusahaan yang tidak.

Seperti yang Okezie (2004) katakan, fungsi audit internal suatu perusahaan dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap operasi perusahaan dan dapat berdampak pada entitas bisnis sehingga kelangsungan perusahaan terjamin. Conrad (2003) telah menggambarkan bahwa kegagalan perusahaan raksasa seperti Enron merupakan konsekuensi dari beberapa pihak yang melakukan tindakan yang tidak baik dan tidak adanya kontrol yang memadai terhadap tindakan perusahaan. Dengan demikian sistem kontrol yang tidak memadai akan berdampak negatif pada kesuksesan organisasi.

Definisi audit internal menurut IIA (*Institute of Internal auditor*) Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola. Sedangkan menurut Mulyadi (2002:29), audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Menurut Okezie (2004, dalam Kiabel, Bariyama David 2012) tujuan utama dari audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan memberikan informasi lengkap mengenai analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar terkait mengenai kegiatan yang di *review*.

Keberadaan fungsi audit internal sangat penting bagi perusahaan baik perusahaan swasta atau publik. Namun, kebutuhan akan fungsi pengawasan audit internal sangat bervariasi tergantung dengan besaran atau skala perusahaan, keragaman dan kompleksitas kegiatan perusahaan, jumlah karyawan, serta pertimbangan biaya atau manfaat (ICAEW, 1999). Selain itu pentingnya keberadaan fungsi audit dalam perusahaan dapat menunjukkan dan mencegah penyelewengan dan indikasi kecurangan oleh manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan, sehingga keberadaan fungsi audit internal sangat penting bagi perusahaan. Menurut Hermanson dan Rittenberg (2003) keberadaan fungsi audit internal yang efektif berhubungan erat dengan kinerja organisasi yang unggul.

Komite audit di Indonesia masih terhitung baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada padahal komite audit merupakan salah satu aspek dalam penyelenggaraan good corporate governance (GCG). Di Indonesia sendiri komite audit mulai dikenalkan oleh pemerintah kepada BUMN tertentu pada tahun 1999. Sedangkan Bapepam mulai memberikan anjuran kepada 7 perusahaan yang telah *go public* untuk memiliki komite audit pada tahun 2000, Waharini (2012)

Mazzolini (1979) telah mencatat bahwa kinerja BUMN dapat diukur dengan menggunakan tingkat margin keuntungan perusahaan, laba atas investasi, dan situasi laporan keuangan (misalnya, laporan likuiditas). Berdasarkan

klarifikasi tersebut, penelitian ini mengevaluasi BUMN berdasarkan kinerja keuangannya. Ukuran finansial biasanya berhubungan langsung dengan akun yang bersangkutan dan dapat ditemukan pada laporan laba rugi atau neraca. Ukuran finansial yang sering kali digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan pemegang saham ( *Shareholder* ) biasanya adalah Rasio Profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Shapiro (1991:731) "*Profitability ratios measure managements objectiveness as indicated by return on sales, assets and owners equity.*"

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Menurut Brigham (1993:79).

Menurut pendapat Shapiro (1991) yang menunjukkan bahwa profitabilitas sangat cocok untuk mengukur efektivitas manajemen dan pengevaluasian kinerja manajemen dalam menjalankan bisnis dan produktivitasnya dalam mengelola aset-aset perusahaan secara keseluruhan seperti yang nampak pada pengembalian yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi, serta untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dari bisnis. Secara umum profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan produktivitas dan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menunjukkan efisiensi dan produktivitas perusahaan tersebut.

Banyak yang berpendapat, bahwa fungsi audit internal memiliki peran yang vital dalam mengurangi kecurangan atau *fraud* yang memungkinkan merugikan perusahaan dan mengurangi tingkat kinerja perusahaan. Hermanson dan Ritternberg (2003) berpendapat bahwa “keberadaan fungsi audit internal yang efektif memiliki hubungan dengan unggulnya kinerja perusahaan”. Dengan begitu betapa penting fungsi ini untuk dapat mengandalikan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dalam BUMN dewan komisaris dan direksi sebagai top manajemen juga memiliki pengaruh kuat dalam keberlangsungan organisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Prasad dan Rao (1989), dewan direksi atau komisaris memiliki beban tanggung jawab atas suksesnya atau kegagalan suatu usaha perusahaan, karena dewan pimpinan merupakan puncak tertinggi dalam manajemen dalam perusahaan BUMN.

Di Indonesia praktik intervensi pemerintah yang nyata terjadi di BUMN terdapat dalam dua bentuk yaitu : Pertama, dalam bentuk pengangkatan dewan komisaris atau direksi dalam BUMN. Direksi dan komisaris dalam BUMN dapat diangkat oleh menteri BUMN sehingga menteri BUMN mempunyai kuasa yang sangat besar dalam porsi pengangkatan anggota dewan direksi dan komisaris. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan publik, apakah dewan yang terpilih terindikasi sebagai anggota partai yang sedang berkuasa dalam pemerintahan, pensiunan TNI/POLRI, mantan anggota DPR/MPR atau merupakan seorang profesional dalam bidang tertentu. Karena jika seorang anggota partai yang tanpa pengalaman bekerja dibidangnya tentu dapat membawa pengaruh yang tidak selaras dengan perusahaan, akan tetapi dapat memberikan pandangan lain untuk jajaran dewan lain dengan pertimbangan politis yang merupakan keahlian mereka. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dewan dengan intervensi pemerintah dapat mempengaruhi kinerja BUMN. Dan yang kedua adalah dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan dalam pengelolaan organisasi melalui rapat-rapat dewan tertinggi dalam perusahaan.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini memberikan wewenang penuh kepada Kementerian BUMN untuk memilih dewan komisaris dan dewan pengawas yang dianggap pantas untuk menempati posisi puncak pimpinan perusahaan dan



menjalankan perusahaan dengan maksimal serta menghindari berbagai kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, negara, dan masyarakat.

Sedangkan peraturan pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan direksi BUMN diatur dalam peraturan menteri BUMN NO. PER-03/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan ini diatur jelas bahwa dewan direksi dalam perusahaan harus merupakan seorang profesional dalam bidangnya dan tidak ter-afiliasi dengan politik dan kekuasaan. Sehingga diharapkan dewan direksi yang merupakan puncak tertinggi dalam manajemen dapat memaksimalkan kinerja organisasi dan diharapkan menjalankan tujuan utamanya yaitu melayani masyarakat dapat tercapai.

Pemilihan kinerja finansial perusahaan sebagai cara untuk mengukur variabel ini dengan alasan bahwa kinerja finansial merupakan hal yang dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan juga bergantung pada keberadaan fungsi audit internal. Hal ini didasarkan pada pendapat Emmanuel et al (1990), ukuran kinerja keuangan meliputi dua tujuan : mengukur laba untuk diberikan kepada para *shareholders* dan memberikan penilaian terhadap kemampuan organisasi secara keseluruhan. Indikator kinerja – tingkat laba, tingkat pengembalian aset, dan tingkat pengembalian ekuitas ( profit margin, ROI, dan ROE ) yang dengan demikian akan diadopsi dalam penelitian ini.

Untuk itu penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Kiabel (2012) yang berjudul “*Internal Auditing and Performance of Government*

*Enterprises : A Nigerian Study*". Penelitian kembali dilakukan di Indonesia karena untuk mengetahui apakah kinerja BUMN di Indonesia yang buruk merupakan pengaruh dari efektifitas fungsi audit internal yang memadai dan pengaruh politik yang terjadi di Indonesia. Yang secara khusus penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui apakah pengaruh politik memberikan dampak Moderasi yang signifikan terhadap pengaruh efektifitas fungsi audit internal terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH EFEKTIFITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN BUMN DIMODERASI OLEH PENGARUH POLITIK ( STUDI EMPIRIS DI INDONESIA )**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menunjukkan terjadinya kontroversi dalam pandangan terhadap pengelolaan BUMN di Indonesia. Maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengelola BUMN dengan baik dan meningkatkan kinerjanya. Permasalahan penelitian tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian :

1. Apakah fungsi audit internal memiliki hubungan dengan tingkat profitabilitas dalam BUMN ?

2. Apakah pengaruh politik dalam manajemen di BUMN memberi pengaruh terhadap hubungan antara keberadaan fungsi internal audit dan kinerja keuangan di BUMN ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah :

“Untuk memberikan bukti empiris apakah pengaruh politik dalam manajemen di BUMN secara signifikan berpengaruh dalam hubungan antara efektivitas fungsi internal audit yang memadai dengan kinerja BUMN”.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan dan kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.
2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang pengaruh politik terhadap kinerja BUMN. Mengingat bahwa jaranganya penelitian yang meneliti tentang kinerja BUMN, semoga penelitian ini dapat mengisi kesenjangan tersebut.

3. Bagi perusahaan sektor publik, adanya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan sebuah harapan untuk tetap menjalankan perusahaan dengan sikap yang independen dan memajukan BUMN untuk kepentingan bangsa dan negara.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika dari penulisan penelitian ini.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab hasil penelitian dan analisis berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab penutup berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Bab ini akan membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. Sub bab tersebut masing-masing akan diuraikan sebagai berikut.

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas principal, dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima reward dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dengan kendala (*constraint*) manfaat (*utility*) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Karena kepentingan yang berbeda sering muncul konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).

Eisendhart (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu : (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Dalam perusahaan milik pemerintah (BUMN) konflik *agency* yang terjadi terletak pada dua hal yang utama. Pertama, konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Kedua, dalam perusahaan BUMN memungkinkan praktek "*two-board*" antara direksi dan dewan komisaris, implementasi sistem ini dianggap tidak efektif ( Kurniawan dan Indriantoro : 2000 ) hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang jelasnya *job description* dari dua jabatan tersebut. Teori keagenan ini menjelaskan bagaimana variabel mediasi (Pengaruh Politik) mempengaruhi hubungan antara kinerja keuangan BUMN dan efektifitas fungsi audit internal dalam BUMN dalam dua permasalahan diatas. Akan tetapi dalam penelitian ini akan memfokuskan permasalahan konflik keagenan pada permasalahan yang pertama.

### 2.1.2 Efektivitas Audit Internal

Internal audit telah lama dikenal sebagai alat yang efektif dalam mengendalikan manajemen di banyak organisasi. Hal tersebut telah menjadi bagian dalam perusahaan dan diakui dengan baik dalam sektor publik maupun sektor swasta dalam kegiatan industri selama bertahun-tahun. Audit internal sering dilihat sebagai kegiatan monitoring dengan tanggung jawab terhadap manajemen untuk menilai efektivitas dari prosedur pengendalian yang bertanggungjawab terhadap manajemen fungsional lain. Fungsi audit internal secara terstruktur bertanggung jawab terhadap manajemen di atasnya sesuai dengan struktur dalam organisasi sebagai entitas yang terdapat dalam perusahaan. Menurut *Okezie (2004, dalam Kiabel, Bariyama David 2012)* tujuan utama dari audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan memberikan informasi lengkap mengenai analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar terkait mengenai kegiatan yang di *review*.

Definisi audit internal menurut IIA (*Institute of Internal auditor*) Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola. Sedangkan menurut Mulyadi (2002:29), audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh



manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Dari definisi di atas, ditekankan bahwa peranan dan tujuan auditor internal tidak hanya bersifat internal, namun sudah lebih dimodifikasi yang mana saat ini auditor internal modern lebih menekankan pada adanya suatu value added atau nilai tambah pada semua hal yang berkaitan dengan risiko, tata kelola (governance) dan pengendalian (Kumaat, 2011). Nilai tambah disini maksudnya ialah laporan hasil pemeriksaan auditor internal tersebut tidak selesai begitu saja atau hanya bersifat mandatory, namun akan dikembangkan sehingga kemungkinan kesalahan yang terjadi tidak akan terulang.

Banyak profesional audit internal berpendapat bahwa fungsi audit internal yang efektif adalah fungsi audit internal yang berkorelasi dengan peningkatan kinerja keuangan. Menurut Bejide (2006), fungsi audit internal yang baik dapat membantu mengurangi overhead, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan paparan tentang kemungkinan kerugian perusahaan dari aset yang tidak dimanfaatkan maksimal atau hilang yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Seperti halnya, Venables dan Impey (1991) menyatakan bahwa audit internal adalah alat yang sangat berharga bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja. Fadzil et al (2005) juga mencatat bahwa auditor internal yang membantu jalannya perusahaan untuk lebih efektif dan efisien dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Kemudian

Hermanson dan Ritternberg (2003) berpendapat bahwa “keberadaan fungsi audit internal yang efektif memiliki hubungan dengan unggulnya kinerja perusahaan”.

Keberadaan fungsi audit internal sangat penting bagi perusahaan baik perusahaan swasta atau publik. Namun, kebutuhan akan fungsi pengawasan audit internal sangat bervariasi tergantung dengan besaran atau skala perusahaan, keragaman dan kompleksitas kegiatan perusahaan, jumlah karyawan, serta pertimbangan biaya atau manfaat (ICAEW, 1999). Selain itu, Venables dan Impey (1991) berpendapat bahwa fungsi internal audit yang efektif terhadap organisasi adalah untuk menyadarkan organisasi tentang keuntungan maksimal yang akan didapat organisasi, fungsinya juga harus dapat dijelaskan dengan objektif, memiliki otoritas yang jelas, independen dan memiliki sumber daya yang sesuai.

#### **2.1.2.1. Internal Audit Disclosure**

Standar praktik audit internal di Indonesia mengalami kemajuan yang baik dengan hadirnya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.PER—01/MBU/2011 mengenai Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN, yang diperjelas lebih lanjut dengan keputusan Sekretaris Menteri BUMN nomor SK- 16 /S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas GCG pada BUMN.

Di dalam keputusan Sekretaris Menteri BUMN nomor SK-16/S.MBU/2012, dinyatakan bahwa salah satu indikator penilaian kinerja perusahaan adalah bahwa Direksi BUMN harus menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. Pengawasan intern atau audit internal yang

berkualitas dan efektif, menurut ketentuan tersebut setidaknya memiliki tiga parameter, sebagai berikut :

1. Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi
2. Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya, dan
3. Audit Internal melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki oprasional perusahaan.

Disamping itu terdapat pula aturan pemerintah dalam UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN dalam bagian ke VII tentang Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, dan Komite lain dalam pasal 67 ayat 1 menyebutkan bahwa Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. Yang seterusnya diatur dalam pasal 68 bahwa Direksi diwajibkan memberikan keterangan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

Menurut Hiro Tugiman (2006) dalam perkembangannya, peran yang dijalankan auditor internal dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu sebagai watchdog, konsultan, dan katalis. Berikut merupakan penjelasan dari bagian tersebut:

a. Watchdog

Watchdog adalah peran tertua dari auditor internal yang mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, menghitung dan cek dan ricek. Adapun

tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Proses audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan. Fokus pemeriksaannya adalah adanya variasi atau penyimpangan dalam sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan mengidentifikasi penyimpangan sehingga dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian internal. Oleh karena sifat pekerjaannya, peran watchdog biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek.

#### b. Konsultan

Melalui peran ini, manajemen akan melihat bahwa selain sebagai watchdog, auditor internal dapat memberikan manfaat lain berupa saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas para manajer. Peran konsultan membawa auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah.

#### c. Katalis

Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan.

Audit internal menyediakan suatu opini atau pendapat yang bersifat independen dan objektif dalam hal manajemen risiko, pengendalian, dan tata

kelola (governance) dengan cara mengukur dan mengevaluasi keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari audit internal diharapkan memberikan manfaat yang besar untuk manajemen sebuah organisasi dalam hal audit. Audit internal juga menyediakan jasa konsultasi yang bersifat independen dan objektif untuk membantu manajemen suatu organisasi dalam meningkatkan manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Jasa konsultasi ini menerapkan kemampuan profesional dari audit internal melalui evaluasi yang bersifat sistematis dan disiplin akan kebijakan, prosedur, dan operasi yang dilakukan oleh manajemen organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi tersebut dan juga melalui rekomendasi untuk peningkatannya.

Tujuan audit internal menurut Tugiman (2003) adalah untuk membantu anggota organisasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiatan yang dianalisis. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan dari sistem pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal

- b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan
- d. Memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya
- e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen
- f. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit intern. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, menurut Hiro Tugiman (2006) adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengujian Audit

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal

lainnya yang berkaitan dengan proses auditing. Menurut Hiro Tugiman (2006) audit internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi :

- a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan
- b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa
- c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit
- d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
- e. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan
- f. Penulisan program audit
- g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan
- h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit

## 2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Menurut Tugiman (2006), proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :

- a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksa dan lingkup kerja

- b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi
- c. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk tehnik-tehnik pengujian
- d. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
- e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan

### 3. Penyampaian hasil Pemeriksaan

Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saransaran/rekomendasi untuk perbaikannya.

Menurut Hiro Tugiman (2006) audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:

- a. Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit intern pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi
- b. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu
- c. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan
- d. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi.



- e. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan
- f. Pimpinan audit intern mereview dan menyetujui laporan audit

#### 4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

Laporan hasil audit internal dibuat setelah audit dilakukan. Laporan merupakan hal yang sangat penting karena dalam laporan ini auditor internal menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor internal untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan yang telah diauditnya. Laporan hasil audit yang objektif dan efektif akan sangat bermanfaat bagi manajemen. Laporan hasil audit yang efektif sangat tergantung pada kualitas pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Harus diperhatikan pula bahwa pekerjaan audit yang baik pun akan kurang berarti apabila penyajian laporan hasil audit kurang memadai. Menurut Tugiman (2006) hal yang harus diperhatikan dalam menyapaikan laporan audit yang baik yaitu:

- a. Laporan tertulis yang telah di tandatangani dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan selesai dilakukan, sedangkan laporan sementara dapat dibuat secara tertulis maupun lisan dan diserahkan secara formal atau informal.
- b. Sebelum laporan itu diterbitkan, auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen, sebelum mengeluarkan laporan akhir.
- c. Laporan harus objektif, ringkas, jelas, konstruktif dan tepat waktu.
- d. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, bila dipandang perlu laporan harus berisikan pernyataan tentang pendapat auditor.
- e. Laporan dapat mencangkup rekomendasi yang membangun dan menyatakan hasil serta tindakan koreksi yang memuaskan.
- f. Laporan harus mencangkup pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dan dapat pula dicantumkan dalam laporan audit.
- g. Laporan harus disetujui oleh kepala bagian auditor internal sebelum diterbitkan serta harus menyatakan kepada siapa laporan ditunjukan.

#### **2.1.2.2. Komite Audit**

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, tertanggal 24 September 2004 pada peraturan No. IX I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite audit didefinisikan sebagai komite

yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting dalam menerapkan prinsip GCG (Good Corporate Governance) yaitu dengan adanya komite audit yang efektif. Komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam kriteria penilaian dalam menilai pelaksanaan GCG yang baik.

Y. Zang, et al. (2007) menyatakan komite audit yang lebih besar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal dibandingkan dengan komite audit yang lebih sedikit. Ukuran Komite Audit berdasarkan KEP-399/BEJ/07-2001 adalah komite audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, satu di antaranya harus merupakan komisaris independen yang juga menjabat sebagai ketua komite audit, sementara dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana satu di antaranya harus memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan.

#### 1. Keahlian Akuntansi dan/atau Keuangan Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, salah satu persyaratan keanggotaan Komite audit adalah memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Sewajarnya anggota komite audit memiliki pengetahuan tentang konsep akuntansi dan proses akuntansi sehingga dapat membantu manajemen dan anggota komite audit lainnya terkait proses pelaporan keuangan, pengindentifikasian masalah, dan penyelesaian masalah. Hal ini bermaksud ketika ada masalah dalam pengendalian internal, anggota komite audit yang memiliki keahlian

keuangan dapat segera menangani masalah dan ada kemungkinan mereka dapat mencegah salah saji dalam pelaporan laporan keuangan.

Di Amerika Serikat, The Blue Ribbon Committee (1999) mengacu pada konsep akuntansi dan/atau keahlian keuangan terkait keahlian menandakan adanya pengalaman kerja di bidang keuangan atau akuntansi, sertifikasi profesional yang diperlukan dalam akuntansi, atau lainnya yang sebanding, pengalaman atau latar belakang keahlian keuangan individu, termasuk menjadi atau memiliki menjadi CEO atau officer senior lainnya dengan tanggung jawab pengawasan keuangan.

SEC mendefinisikan konsep ahli keuangan terfokus pada apakah direktur telah memiliki pengalaman sebelumnya terkait akuntansi dengan pelaporan keuangan SEC dan menyarankan bahwa direktur tersebut harus memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, CFO, kontroler, atau CAO. SEC telah menyetujui dengan menambahkan unsur-unsur berikut untuk pengalaman akuntansi: pengalaman mengawasi karyawan, tanggung jawab pelaporan keuangan, mengawasi kinerja perusahaan, dan pengalaman yang relevan lainnya. Meskipun SEC tidak secara eksplisit menjelaskan jenis pekerjaan, definisi ini tampaknya mencakup presiden perusahaan dan CEO (De Fond, et al., 2005).

Penelitian DeFond, et al. (2005) secara signifikansi positif menunjukkan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi dan/ atau keuangan memperbaiki tata kelola perusahaan. Anggota komite audit dapat

diklasifikasikan menjadi dua katagori yaitu keahlian akuntansi keuangan dan keahlian non akuntansi keuangan.

#### 1. Keahlian Akuntansi Keuangan

DeFond, et al. (2005) menyatakan komite audit dengan keahlian akuntansi dan/atau keuangan merupakan seorang ahli akuntansi keuangan yang memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor auditor, chief financial officer (CFO), kontroler, prinsipal, atau chief accounting officer (CAO).

#### 2. Keahlian non akuntansi keuangan

DeFond, et al. (2005) menyatakan komite audit dengan keahlian non akuntansi keuangan adalah seorang yang memiliki pengalaman sebagai CEO, presiden direktur, atau kepala dewan dalam sebuah perusahaan yang berorientasi profit, atau seseorang yang berpengalaman sebagai managing director, partner atau prinsipal dari sebuah perusahaan ventura, investment banking, atau manajer keuangan.

#### 2. Rapat Komite Audit

Artikel FCGI (2002) menyebutkan bahwa Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut sistem pelaporan keuangan. Treadway Commission (1987) dalam Sori, et al., (2007) juga menyatakan Komite Audit sebaiknya bertemu minimal empat kali dalam satu tahun.

Adanya kemungkinan bahwa rapat komite audit dengan frekuensi yang lebih dapat mendiskusikan isu-isu tentang pengendalian internal, ketika ada masalah yang signifikan berhubungan dengan masalah pengendalian internal, Y. Zang, et al. (2007). Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### 3. Independensi Komite Audit

Krishnan (2005) menyatakan bahwa ada hubungan yang positif diantara independensi komite audit dengan kualitas pengendalian internal suatu perusahaan setelah ditetapkannya SOX. Berdasarkan SOX, anggota Komite Audit dikatakan independen jika tidak berafiliasi dengan perusahaan tidak menerima consulting fees dan menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 Komite Audit disyaratkan tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan keluarga karena keluarga atau perkawinan baik secara vertikal maupun horizontal dengan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama Emiten, atau Perusahaan Publik dan/atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 dinyatakan bahwa kedudukan Komite Audit berada di bawah Dewan Komisaris dan salah seorang Komisaris Independen sekaligus menjadi ketua

Komite Audit. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan.

Anggota Komite Audit disyaratkan berasal dari pihak yang tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

#### **2.1.2.3. Eksternal Audit**

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan . Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan.(Meutia,2004)

Scott et al (2000) dalam Meutia (2004) mengatakan bahwa auditor yang independen dapat menjadi pelindung terhadap praktek-praktek akuntansi yang dimanipulasi, karena auditor tidak hanya dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam dibidang akuntansi tetapi juga dapat berhubungan dengan *audit commitee* dan dewan direksi yang bertanggung jawab untuk memeriksa dengan teliti para pembuat keputusan di perusahaan.

Goldman dan Barlev (1974) dalam Meutia (2004) menyatakan bahwa laporan auditor mengandung kepentingan tiga kelompok yaitu: (1) manajer perusahaan yang diaudit; (2) pemegang saham perusahaan; dan (3) pihak ketiga atau pihak luar seperti calon investor, kreditor dan suplier. Masing-masing kepentingan ini merupakan sumber gangguan yang akan memberikan tekanan pada auditor untuk menghasilkan laporan yang mungkin tidak sesuai dengan standar profesi.

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Mulyadi (2002) ada lima tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu :



1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion Report*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion report with Explanatory Language*)

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain dalam laporan audit, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien.

3. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion Report*)

Auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit jika menjumpai kondisi-kondisi berikut ini :

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.

- c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
  - d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
4. Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion Report*)

Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya.

5. Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer of Opinion Report*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah :

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Opini auditor eksternal juga memiliki peran penting dalam penilaian efektifitas sistem audit dalam perusahaan, yaitu sebagai “efek cermin” dari sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan. Opini audit ini bisa dijadikan sebagai pembanding dan juga sebagai penegasan kembali dari serangkaian proses

yang dilalui oleh kinerja sistem pengendalian dalam perusahaan. Sehingga apabila kinerja sistem pengendalian dalam perusahaan berjalan dengan baik, memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan opini yang diharapkan oleh perusahaan.

### **2.1.3 Kinerja Perusahaan**

Kinerja adalah istilah yang sering didiskusikan akan tetapi definisi dari kinerja itu sendiri jarang sekali didefinisikan. Namun, beberapa penulis berpendapat bahwa istilah tersebut sangat ambigu dan tidak dapat didefinisikan secara sederhana (Emmanuel et al 1990; Otley, 1999). Sebelumnya, Emmanuel et al (1990) telah mengamati bahwa semakin sering istilah tersebut digunakan menunjukkan bahwa hal tersebut digunakan untuk menghindari definisi yang tepat dari apa yang dimaksud. Menurut Euske (1984), definisi yang paling umum dari istilah kinerja adalah “Prestasi Organisasi”. Dengan demikian, sebuah organisasi yang berkinerja baik adalah organisasi yang berhasil mencapai tujuan dan berhasil menerapkan strategi yang sesuai dengan efektif.

Perusahaan milik pemerintah atau BUMN adalah bentuk kerja pemerintah dimana pemerintah sebagai pemegang saham dari perusahaan tersebut dalam melakukan kerja yang telah dipercayakan oleh masyarakat sebagai pembayar pajak. Meskipun, BUMN dapat dievaluasi dengan cara yang sama dengan sektor swasta (mazzolini, 1979), akan tetapi penting untuk diingat bahwa perusahaan ini didirikan untuk memajukan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial ekonomi. Melihat hal tersebut dari dimensi yang sama, beberapa akademisi ( sebagai contoh, Lal, 1980) berpendapat bahwa evaluasi dari investasi

pemerintah harus menggunakan analisis manfaat sosial / analisa biaya. Di Indonesia sendiri, penilaian atau evaluasi kinerja organisasi sektor publik dilihat dengan konsep “*Value for money*” (mardiasmo, 2002; hal 4) yang menjelaskan bahwa konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, efektifitas. Penilaian tersebut menjelaskan bahwa penekanan penilaian kinerja sektor publik harus berfokus pada manfaat yang diterima oleh masyarakat (*outcome*). Akan tetapi terdapat pendapat lain dari beberapa peneliti.

Mazzolini (1979) telah mencatat bahwa kinerja BUMN dapat diukur dengan menggunakan tingkat keuntungan perusahaan, laba atas investasi, dan situasi laporan keuangan (misalnya, laporan likuiditas). Berdasarkan klarifikasi tersebut, penelitian ini mengevaluasi BUMN berdasarkan kinerja keuangannya. Ukuran finansial biasanya berhubungan langsung dengan akun yang bersangkutan dan dapat ditemukan pada laporan laba rugi atau neraca. Menilai kinerja perusahaan juga biasanya dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas guna mendukung kepentingan investor sebagai pemegang saham.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri ( Sarwono, Agus 2001 : 122 ). Dengan demikian bagi investor jangka panjang dan pemerintah sebagai pemegang saham atau pemilik dari perusahaan akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Shapiro (1991:731) "*Profitability ratios measure managements objectiveness as indicated by return on sales, assets and owners equity*". Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan (Supriyono. 1999).

Menurut Emmanuel et al (1990), ukuran kinerja keuangan meliputi dua tujuan : mengukur laba untuk diberikan kepada para *shareholders* dan memberikan penilaian terhadap kemampuan organisasi secara keseluruhan. Indikator kinerja – margin laba, tingkat pengembalian aset, dan tingkat pengembalian ekuitas (profit margin, ROA, dan ROE) yang dengan demikian akan diadopsi dalam penelitian ini.

#### **2.1.4 Pengaruh Politik**

Pengaruh politik atau intervensi dari menteri telah diidentifikasi sebagai gangguan terbesar dalam BUMN (Prasad dan Rao, 1989; Akinsanya, 1992; Babu dan Rao, 1998). Para penulis ini berpendapat bahwa pemerintah melalui kementerian menginginkan untuk dapat mengontrol dengan kuat perusahaan dan tidak mengizinkan perusahaan untuk menjadi badan yang berfungsi secara otonom. Bjorkrnan (1998) berpendapat bahwa pengaruh dari hubungan tersebut dapat berkembang dalam konteks apapun jika setiap salah satu kelompok atau pihak dapat mempengaruhi pihak lain dengan kekuasaan dan sumber dayanya.

Di Indonesia pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan direksi BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan untuk dewan komisaris BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pengaruh politik dalam BUMN pada umumnya dilihat dari pengangkatan direksi atau dewan komisaris dan pejabat tinggi lainnya dalam BUMN oleh kementerian BUMN dan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Sebagaimana dikatakan oleh Prasad dan Rao (1989), dewan direksi atau komisaris memiliki beban tanggung jawab atas suksesnya atau kegagalan suatu usaha perusahaan, karena dewan pimpinan merupakan puncak tertinggi dalam manajemen dalam perusahaan BUMN. Lanjutan dari itu, Akinsanya (1992) telah mengamati bahwa campur tangan politik melalui penunjukan anggota dewan bukanlah suatu ide yang buruk selama dilakukan berdasarkan kinerja.

Di Indonesia Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa dewan direksi yang ditunjuk oleh menteri BUMN harus dari kalangan profesional dan bebas dari afiliasi kelompok partai politik atau kelompok kepentingan diluar perusahaan. Masalah utama dalam BUMN diduga adalah dari penunjukan anggota

komisaris yang merupakan seorang profesional dibidangnya atau seorang kader partai yang loyal terhadap partainya yang cenderung menempatkan kepentingannya atau kepentingan partainya sebelum kepentingan masyarakat atau kepentingan keberlangsungan BUMN. Karena Dengan demikian, hal tersebut akan mengganggu manajemen perusahaan dari pada menghasilkan kebijakan yang baik untuk manajemen.

Komposisi komisaris dalam perusahaan merupakan hal yang penting dalam BUMN, keberadaan afiliasi politik dianggap menjadi sebuah kendala terbesar keanggotaan dewan komisaris. Tarik menarik kepentingan akan menjadi sebuah hal utama dalam rapat dewan komisaris, dan hal yang sangat dihindari adalah keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sarat dengan kepentingan politik diluar perusahaan.

### **2.1.5 Audit Internal dan Kinerja Perusahaan**

Banyak profesional audit internal berpendapat bahwa fungsi audit internal yang efektif adalah fungsi audit internal yang berkorelasi dengan peningkatan kinerja keuangan. Menurut Bejide (2006), fungsi audit internal yang baik dapat membantu mengurangi overhead, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan paparan tentang kemungkinan kerugian perusahaan dari aset yang tidak dimanfaatkan maksimal atau hilang yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Seperti halnya, Venables dan Impey (1991) menyatakan bahwa audit internal adalah alat yang sangat berharga bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja. Fadzil et al (2005)

juga mencatat bahwa auditor internal yang membantu jalannya perusahaan untuk lebih efektif dan efisien dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Kemudian Hermanson dan Ritternberg (2003) berpendapat bahwa “keberadaan fungsi audit internal yang efektif memiliki hubungan dengan unggulnya kinerja perusahaan”.

Fungsi audit internal menurut Mulyadi (2002) adalah menyediakan jasa analisis dan evaluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Robert Tampubolon (2005) fungsi audit intern lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Selain itu, uraian atas fungsi audit internal menurut Mulyadi (2002) antara lain:

- a. Pemeriksaan (audit) dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian internal dan mendorong penggunaan struktur pengendalian internal yang efektif dengan biaya yang minimum.
- b. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
- c. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.
- d. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.
- e. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.



Oleh sebab itu, fungsi audit internal merupakan suatu alat yang dapat digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan kearah yang lebih baik. Fungsi audit internal yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan (profitabilitas) dan juga dapat membantu manajemen dalam mengelola perusahaan untuk mengendalikan *fraud* yang mungkin terjadi dalam manajemen di perusahaan. Keberadaan fungsi ini sangat penting dalam perusahaan, sehingga diharapkan BUMN di Indonesia memiliki fungsi audit internal yang baik untuk menunjang kinerja perusahaan baik kinerja operasional maupun kinerja keuangan perusahaan.

## **2.2 Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mendeteksi adanya hubungan antara pengaruh politik terhadap kinerja BUMN atau perusahaan milik pemerintah antara lain adalah yang dilakukan oleh Kiable (2012) di Nigeria, mengenai buruknya performa kinerja BUMN di Nigeria yang disebabkan oleh buruknya kinerja dewan yang di indikasikan adanya pengaruh partai tertentu terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BUMN yang menyebabkan performa perusahaan yang tidak konsisten. Dalam penelitiannya Kiable (2012) menyimpulkan bahwa penelitiannya telah memberikan beberapa bukti tentang konsekuensi kinerja praktik audit internal perusahaan milik pemerintah yang terjadi di Nigeria. Dalam model penelitian yang dilakukan oleh Kiable, menempatkan variabel size sebagai filter terhadap sample yang akan diteliti. Secara khusus, fungsi audit internal di perusahaan milik pemerintah tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan pengaruh atau gangguan politik dengan cara pengangkatan anggota dewan atau direksi tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan di perusahaan milik pemerintah tersebut. Kelemahan dari penelitian Kiable (2012) ini adalah tidak memeriksa bagaimana pengaruh kepemilikan saham campuran, yaitu sebagian milik pemerintah dan sebagian milik investor swasta sehingga dapat melihat apa dampak unsur –unsur kepemilikan swasta dan pemerintah akan berdampak pada praktik audit internal. Kemudian perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah adanya pengurangan hipotesa 1 – 3 dalam penelitian kiable yang dianggap sama impact nya dalam penelitian menurut penulis, sehingga h1 – h3 dalam penelitian Kiable di kerucutkan menjadi 1 hipotesa saja. Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kiable menggunakan data primer yang dirasa terlalu subyektif dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam penelitian ini akan disajikan data sekunder dan primer yang akan digunakan untuk perbandingan dalam pengambilan keputusan.

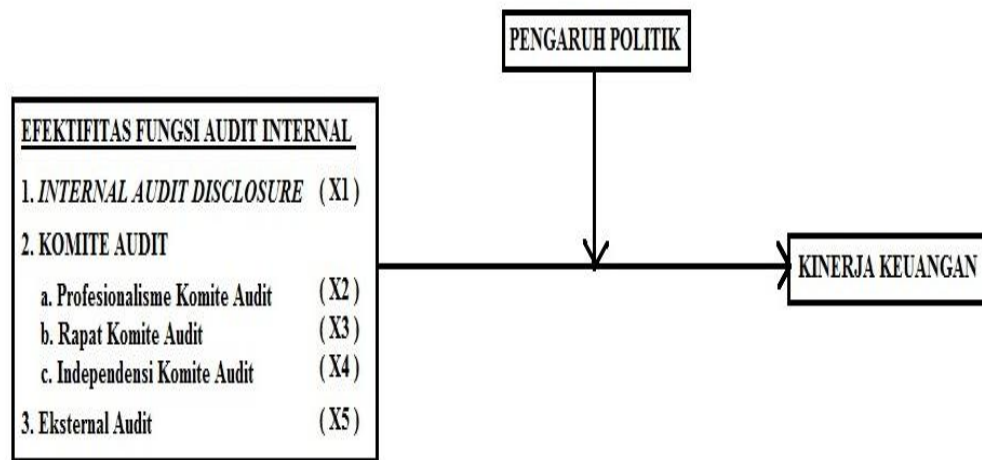
### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan telaah yang telah diungkapkan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis pengaruh Efektifitas Fungsi Audit terhadap Kinerja Keuangan dan dimoderasi oleh *political influence* pada BUMN di Indonesia. Model penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis. Model kerangka

pemikiran akan menguji pengaruh dari efektivitas fungsi audit internal terhadap kinerja keuangan dimoderasi oleh pengaruh politik.

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Efektivitas fungsi audit internal dengan kinerja keuangan.

Pada tingkat empiris, survei yang dilakukan oleh KPMG (1999) menemukan bahwa fungsi audit internal dalam perusahaan memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja dan membantu dalam mengidentifikasi peluang peningkatan laba. Selain itu, bukti penelitian dalam turunnya kinerja perusahaan akibat kecurangan, seperti kecurangan dalam memanipulasi kinerja keuangan secara konsisten telah di catat dalam hubungan antara manajemen yang lemah (misalnya kurang independensi direksi atau tidak adanya fungsi audit

internal) dan keterjadian masalah dalam perusahaan. ( Dechow et al 1996, Beasley et all 2000, Abott et all 2000). Jadi audit internal sebagai fungsi pengawasan dapat menyelamatkan organisasi dari tindakan malpraktek dan penyimpangan yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya yaitu untuk memastikan tingkat produktifitas yang tinggi dan juga laba. Venables dan Impey (1991) juga berpendapat bahwa fungsi internal audit yang efektif terhadap organisasi adalah untuk menyadarkan organisasi tentang keuntungan maksimal yang akan didapat organisasi, fungsinya juga harus dapat dijelaskan dengan objektif, memiliki otoritas yang jelas, independen dan memiliki sumberdaya yang sesuai.

Menurut Euske (1984), definisi yang paling umum dari istilah kinerja adalah “Prestasi Organisasi”. Dengan demikian, sebuah organisasi yang berkinerja baik adalah organisasi yang berhasil mencapi tujuan dan berhasil menerapkan strategi yang sesuai dengan efektif. Dalam penerapannya kinerja BUMN harus dapat diukur dengan mengedepankan kepentingan sosial dan ekonomi Lal, 1980 berpendapat bahwa evaluasi dari investasi pemerintah harus menggunakan analisis manfaat sosial/analisa biaya.

Mazzolini (1979) telah mencatat bahwa kinerja BUMN dapat diukur dengan menggunakan tingkat keuntungan perusahaan, laba atas investasi, dan situasi laporan keuangan (misalnya, laporan likuiditas). Berdasarkan klarifikasi tersebut, penelitian ini mengevaluasi BUMN berdasarkan kinerja keuangannya. Ukuran finansial biasanya berhubungan langsung dengan akun yang bersangkutan dan dapat ditemukan pada laporan laba rugi atau neraca.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri ( Sarwono, Agus 2001 : 122 ). Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan (Supriyono. 1999). Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Rasio Profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Menurut Emmanuel et al (1990), ukuran kinerja keuangan meliputi dua tujuan : mengukur laba untuk diberikan kepada para *shareholders* dan memberikan penilaian terhadap kemampuan organisasi secara keseluruhan. Indikator kinerja – margin laba, tingkat pengembalian Aset, dan tingkat pengembalian ekuitas ( profit margin, ROA, dan ROE ) yang dengan demikian akan diadopsi dalam penelitian ini.

Dalam prakteknya, menurut Sarwono (2001 : 122) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah :

1. *Profit Margin*
2. *Return of Asset ( ROA )*
3. *Return of Equity ( ROE )*

*Profit margin on sales* atau ratio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini dikenal juga dengan nama profit margin. Terdapat dua rumusan untuk menghitung *Profit Margin* yaitu sebagai berikut :

- a. Margin Laba Kotor dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

Maka semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. Tetapi perlu diperhatikan bahwa Margin Laba Kotor sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan, apabila harga pokok penjualan meningkat maka Margin Laba Kotor akan menurun, begitu pula sebaliknya.

- b. Margin Laba Bersih dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan.

Baik Margin Laba Kotor maupun Margin Laba Bersih apabila rasio nya tinggi ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, sebaliknya kalau rasionya rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen.

*Return of Asset* atau tingkat pengembalian aset merupakan rasio yang mengukur seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.. Dengan demikian rumus yang digunakan dalam menentukan ROA adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal

ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.

*Return of Equity* atau Tingkat Pengembalian Ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. ROE dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

ROE dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini dipengaruhi besar kecilnya utang perusahaan, apabila porsi hutang semakin besar maka rasio ini juga semakin besar. Menurut Helfert (2000), Return on Equity (ROE) menjadi pusat perhatian para pemegang saham ( *stakeholders* ) karena berkaitan dengan modal saham yang diinvestasikan untuk dikelola pihak manajemen. ROE memiliki arti penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam memenuhi harapan pemegang



saham. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

**Ho1 : Tidak ada pengaruh antara Efektifitas Fungsi Audit Internal terhadap Kinerja Perusahaan dalam BUMN di Indonesia.**

**Ha1 : Terdapat pengaruh antara Efektifitas Fungsi Audit Internal terhadap Kinerja Perusahaan dalam BUMN di Indonesia.**

#### **2.4.2 Pengaruh politik pada pengelolaan BUMN**

Pengaruh politik dalam perusahaan merupakan sebuah pertanyaan besar dalam dunia bisnis. Pengaruh politik dalam perusahaan menurut pendapat berbagai penulis terdapat dua kutub besar, salah satu kutubnya berpendapat bahwa pengaruh politik dalam perusahaan dapat berdampak buruk bagi jalannya organisasi akibat dari intervensi dan kontrol yang terlalu berlebihan dan salah kutub yang lain berpendapat sebaliknya. Akinsanya (1992) telah mengamati bahwa campur tangan politik melalui penunjukan anggota dewan bukanlah suatu ide yang buruk selama dilakukan berdasarkan kinerja.

Pengaruh politik dalam BUMN pada umumnya dilihat dari pengangkatan dewan komisaris dalam BUMN dan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Sebagaimana dikatakan oleh Prasad dan Rao (1989), dewan yang bertanggung jawab atas suksesnya atau kegagalan suatu usaha yang sebagian besar tergantung pada konstitusi dan komposisi manajemen yang lebih tinggi. Sehingga peran penunjukan dewan komisaris dalam perusahaan menjadi sangat penting dalam BUMN. Terutama jika dewan yang dipilih merupakan dewan yang bukan berasal

dari kalangan profesional melainkan dari kalangan politisi atau yang terafiliasi politik yang terutama memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai. Hal tersebut dapat diindikasikan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi pengaruh moderasi pengaruh politik terhadap pengaruh efektivitas audit internal terhadap kinerja perusahaan dilakukan dengan mendata komisaris BUMN dengan kriteria perusahaan BUMN *Go Public* dan melihat *track record* komisaris BUMN *Go Public* dan dinilai rasio susunan kepengurusan dewan komisaris dari BUMN tersebut. Dari ulasan diatas maka pengembangan hipotesisnya adalah :

**Ho2 : Tidak ada pengaruh moderasi dari Pengaruh Politik terhadap Pengaruh Efektifitas Fungsi Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Di BUMN.**

**Ha2 : Terdapat pengaruh moderasi dari Pengaruh Politik terhadap Pengaruh Efektifitas Fungsi Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Di BUMN**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis. Variabel tersebut dibagi menjadi tiga yaitu : variabel terikat atau dependen, variabel tidak terikat, dan variabel moderating. Ketiga jenis variabel tersebut akan dijabarkan pada bagian ini berikut dengan definisi operasional dan pengukurannya.

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka variabel dependen dari penelitian ini adalah Kinerja Keuangan dengan variabel independen dari penelitian ini adalah Efektifitas Fungsi Audit Internal : 1. *Internal Audit Disclosure*, 2. Profesionalisme komite audit, 3. Rapat komite audit, 4. Independensi komite audit, 5. Eksternal audit, sedangkan variabel moderating-nya adalah Pengaruh Politik (*Political Influence*).

##### **3.1.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

###### **3.1.2.1 Efektifitas Fungsi Audit Internal**

Venables dan Impey (1991) menyatakan bahwa audit internal adalah alat yang sangat berharga bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja. Fadzil et al

(2005) juga mencatat bahwa auditor internal yang membantu jalannya perusahaan untuk lebih efektif dan efisien dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Kemudian Hermanson dan Ritternberg (2003) berpendapat bahwa “keberadaan fungsi audit internal yang efektif memiliki hubungan dengan unggulnya kinerja perusahaan”.

Efektifitas fungsi audit internal diukur menggunakan beberapa indikator berikut ini :

#### *1. Internal Audit Disclosure*

Tujuan audit internal menurut Tugiman (2003) adalah untuk membantu anggota organisasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiatan yang dianalisis.

Menurut Hiro Tugiman (2006) Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit intern. Dalam point ke 3 di jelaskan tentang Penyampaian hasil Pemeriksaan. Dimana, Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan yang

terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

Di dalam keputusan Sekretaris Menteri BUMN nomor SK-16/S.MBU/2012, dinyatakan bahwa salah satu indikator penilaian kinerja perusahaan adalah bahwa Direksi BUMN harus menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. Pengawasan internal atau audit internal yang berkualitas dan efektif, menurut ketentuan tersebut setidaknya memiliki tiga parameter, sebagai berikut :

- a. Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Internal yang ditetapkan oleh Direksi
- b. Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya, dan
- c. Audit Internal melaksanakan pengawasan internal untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.

Untuk mengukur indikator *Internal Audit Disclosure* dalam penelitian ini menggunakan tiga parameter diatas, dihitung menggunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{INTERNAL AUDIT DISCLOSURE ( IAD )} = \frac{\Sigma \text{ Parameter IAD Terpenuhi}}{\Sigma \text{ Parameter IAD}} \times 100\%$$

## 2. Komite Audit

Y. Zang, et al. (2007) menyatakan komite audit yang lebih besar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal dibandingkan dengan komite audit yang lebih sedikit. Ukuran Komite Audit berdasarkan

KEP-399/BEJ/07-2001 adalah komite audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, satu di antaranya harus merupakan komisaris independen yang juga menjabat sebagai ketua komite audit, sementara dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana satu di antaranya harus memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan. Selain itu terdapat beberapa hal seperti rapat komite audit dan independensi dari komite audit juga digunakan untuk mengukur keefektifitasan audit internal dalam perusahaan. Ukuran yang dapat digunakan untuk menilai indikator komite audit adalah :

a. Keahlian Akuntansi dan/atau Keuangan Komite Audit

Penelitian DeFond, et al. (2005) secara signifikan positif menunjukkan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi keuangan memperbaiki tata kelola perusahaan. Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang anggota Komite Audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Berdasarkan penelitian tersebut, pada penelitian ini keahlian dalam bidang keuangan diukur dari persentase anggota komite audit yang ahli dalam akuntansi dan/atau keuangan.

$$\text{Keahlian Audit Internal} = \frac{\Sigma \text{ ahli akuntansi dan/atau keuangan}}{\Sigma \text{ anggota komite audit}} \times 100 \%$$

## b. Rapat Komite Audit

Artikel FCGI (2002) menyebutkan bahwa Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut sistem pelaporan keuangan. Treadway Commission (1987) dalam Sori, et al., (2007) juga menyatakan Komite Audit sebaiknya bertemu minimal empat kali dalam satu tahun.

Audit Committee Meetings (ACMEET) diukur dari jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh Menon dan Williams (1994) dan Xie, et al.(2003), menunjukkan bahwa komite audit yang efektif bisa terjadi jika melakukan pertemuan secara tetap.

Rapat Dewan Komisaris atau Board meetings (BDMEET) diukur dari jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pertemuan dewan yang sering dilakukan dapat meningkatkan efektivitas dari dewan direksi. Conger, et al. (1998) dalam Y. Zang, et al. (2007).

$$\text{Rapat Komite Audit} = \frac{\Sigma \left( \frac{\text{Kehadiran Rapat}}{\text{Total Rapat}} \right)}{\text{Anggota Komite Audit}} \times 100\%$$

## c. Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit disyaratkan berasal dari pihak yang tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola

perusahaan dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

Audit Committee Independence (ACI) diukur dari jumlah anggota komite audit yang merupakan pihak eksternal yang independen.

$$ACI = \frac{\Sigma \text{komite audit independen}}{\Sigma \text{anggota komite audit}} \times 100 \%$$

### 3. Eksternal Audit

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini auditor eksternal juga memiliki peran penting dalam penilaian efektifitas sistem audit dalam perusahaan, yaitu sebagai “efek cermin” dari sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan. Opini audit ini bisa



dijadikan sebagai pembanding dan juga sebagai penegasan kembali dari serangkaian proses yang dilalui oleh kinerja sistem pengendalian dalam perusahaan. Sehingga apabila kinerja sistem pengendalian dalam perusahaan berjalan dengan baik, memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan opini yang diharapkan oleh perusahaan.

Untuk mengukur indikator ini menggunakan rasio dari data pengungkapan opini yang dibuat oleh auditor eksternal selama 5 tahun, jika selama 5 tahun opini audit menunjukkan laporan audit yg optimal berarti efek mirror semakin efektif. Keterangannya adalah sebagai berikut, dimana :

$$\text{Eksternal Audit} = \frac{\Sigma \text{Laporan Menyatakan Opini Wajar}}{\Sigma \text{Tahun Sampel}} \times 100\%$$

### 3.1.2.2 Kinerja Keuangan

Emmanuel et al (1990) menyatakan bahwa, ukuran kinerja keuangan meliputi dua tujuan : mengukur laba untuk diberikan kepada para *shareholders* dan memberikan penilaian terhadap kemampuan organisasi secara keseluruhan. Indikator kinerja – tingkat laba, laba atas investasi, dan tingkat pengembalian ekuitas yang akan digunakan dalam penelitian ini. Falshaw et all ( 2006) juga menyatakan bahwa ukuran kinerja keuangan (yang diadopsi pada penelitian ini) sudah biasa digunakan untuk mengukur kinerja karena kelebihanannya adalah dapat diakses oleh pemangku kepentingan eksternal seperti pemegang saham. Maka dalam penelitian ini menggunakan nilai ROA yang disajikan oleh manajemen

dalam *annual report* tahun 2014. Atau, bisa dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

### 3.1.2.3 Political Influence

Menurut Baron dan Kenny (1986) suatu variabel disebut mediator jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel kriteria (dependen).

Pengaruh politik dalam BUMN pada umumnya dilihat dari pengangkatan direksi atau dewan komisaris dan pejabat tinggi lainnya dalam BUMN dan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Sebagaimana dikatakan oleh Prasad dan Rao (1989), dewan yang bertanggung jawab atas suksesnya atau kegagalan suatu usaha sebagian besar tergantung pada konstitusi dan komposisi manajemen yang lebih tinggi. Kemudian, pengaruh politik juga dapat dideteksi melalui intervensi dewan komisaris melalui rapat dewan terkait dengan keputusan operasional dan praktik audit internal dalam perusahaan. Pengaruh politik atau intervensi dari menteri telah diidentifikasi sebagai gangguan terbesar dalam BUMN (Prasad dan Rao, 1989; Akinsanya, 1992; Babu dan Rao, 1998). Para penulis ini berpendapat bahwa pemerintah melalui kementerian menginginkan untuk dapat mengontrol dengan kuat perusahaan dan tidak mengizinkan perusahaan untuk menjadi badan yang berfungsi secara otonom.

mendeteksi pengaruh moderasi pengaruh politik terhadap pengaruh efektivitas audit internal terhadap kinerja perusahaan dilakukan dengan mendata komisaris BUMN dengan kriteria perusahaan BUMN *Go Public* dan melihat *track record* anggota komisaris BUMN *Go Public* di tahun 2014 dan *track record* selama masa hidupnya. Anggota yang di identifikasikan memiliki afiliasi dengan politik adalah anggota yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota parpol, anggota/mantan anggota TNI/POLRI, memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota parpol lain, dan mantan anggota DPR/MPR. Dari identifikasi diatas kemudian akan dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{Pengaruh Politik} = \frac{\Sigma \text{ anggota komisaris dengan afiliasi politik}}{\Sigma \text{ anggota komisaris}} \times 100 \%$$

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari BUMN *Go Public* yang terdapat di Indonesia. Terdapat 20 BUMN yang terdaftar *Go Public* di tahun 2014.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data *cross section* dimana hanya menggunakan data pada tahun 2014, beberapa data seperti dalam variabel efektivitas fungsi audit internal dalam indikator eksternal audit menggunakan data *annual report* selama 5 tahun dari 2010-2014.

Sumber-sumber data inti dalam penelitian ini diperoleh pada *Annual Report* perusahaan BUMN *Go Public* di tahun 2014 yang di-unduh di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Selain itu data juga diperoleh dari beberapa sumber-sumber tertulis seperti koran, majalah, artikel lepas, dalam media cetak maupun media elektronik.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan ditempuh dalam upaya pengumpulan data dalam penelitian ini sebagian besar diunduh melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dalam mengunduh *annual report* perusahaan bumh. Dalam proses mengetahui *track record* anggota komisaris dilakukan pencarian melalui mesin pencarian informasi [www.google.com](http://www.google.com) dan pencarian manual melalui media cetak.

### **3.5 Metode Analisis**

Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2011). Metode analisis ini berisi tentang jenis atau teknis analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai alasan penggunaan alat analisis tersebut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengujian asumsi dari alat atau teknik analisis tersebut.

### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtoses dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai manajemen laba dengan menggunakan pendekatan discretionary accrual pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor perbankan dan keuangan.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011. h.160).

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal dan uji statistik dengan cara uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan analisis grafik:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah nilai signifikan pada perhitungan tersebut diatas ambang normal yaitu 0,05.

### **3.5.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabelbebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variable independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011):

- 1.2 Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2.2 Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari

multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

3.2 Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
- 2) Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

### **3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik varians dari residual pengamatan-pengamatan tersebut akan tetap. Ketetapan varians ini disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Uji heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan SPSS 16 dan setelah data diolah akan ditampilkan grafik Scatterplot. Dasar analisis grafik Scatterplot adalah sebagai berikut:

1. Jika pola yang muncul seperti titik-titik tertentu dan membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik tersebut menyebar secara merata diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.3 Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Multiple Regression Analysis (MRA) dengan bantuan SPSS 16, karena untuk melihat pengaruh moderasi dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan membandingkan dua persamaan regresi yang akan muncul dalam analisis.

#### 3.5.3.1 Multiple Regression Analysis

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2006). Variabel perkalian antara Efektifitas Fungsi Audit Internal : *Internal Audit Disclosure* ( $X_1$ ), Profesionalisme komite audit ( $X_2$ ), Rapat komite audit ( $X_3$ ), Independensi komite audit ( $X_4$ ), Eksternal audit ( $X_5$ ) dan Pengaruh Politik ( $X_6$ ) merupakan variabel moderating oleh karena menggambarkan pengaruh moderating variabel Pengaruh Politik terhadap pengaruh Efektifitas Fungsi Audit Internal terhadap Kinerja Perusahaan ( $Y$ ). Dan persamaanya adalah sebagai berikut :

$$1. Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$2. Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_1 X_6 + \beta_7 X_2 X_6 + \beta_8 X_3 X_6 + \beta_9 X_4 X_6 + \beta_{10} X_5 X_6 + e$$



Dimana :

$Y$  = Kinerja Keuangan

$X_1$  = *Internal Audit Disclosure*

$X_2$  = Profesionalisme Komite Audit

$X_3$  = Rapat Komite Audit

$X_4$  = Independensi Komite Audit

$X_5$  = Eksternal Audit

$X_6$  = Pengaruh Politik

$X_1X_6$  = Interaksi antara *Internal Audit Disclosure* dengan Pengaruh Politik

$X_2X_6$  = Interaksi antara Profesionalisme Komite Audit dengan Pengaruh Politik

$X_3X_6$  = Interaksi antara Rapat Komite Audit dengan Pengaruh Politik

$X_4X_6$  = Interaksi antara Independensi Komite Audit dengan Pengaruh Politik

$X_5X_6$  = Interaksi antara Eksternal Audit dengan Pengaruh Politik

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ -  $\beta_{10}$ = Koefisien Regresi

$E$  = Error Term ( tingkat kesalahan penduga dalam penelitian )

### 3.5.3.2 Pengujian Hipotesis

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata

variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006).

Menurut Ghozali (2006) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fit* nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak

seperti  $R^2$ , nilai Adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

b. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F )

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ , maka model regresi tidak fit (hipotesis ditolak).
2. Jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , maka model regresi fit (hipotesis diterima).

Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance* level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi *fit*.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji Statistik t )

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).
2. Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan

significance level 0,05 (  $\alpha = 5\%$  ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  maka hipotesis diterima ( koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.